



Judul : Jaga Kerahasiaan Data: Platform MBKM Jangan Dikelola Pihak Ketiga
Tanggal : Rabu, 25 Januari 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Jaga Kerahasiaan Data Platform MBKM Jangan Dikelola Pihak Ketiga

KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) diminta mengelola secara mandiri *platform* digital Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dikelola pihak ketiga.

Langkah ini penting, mengingat banyaknya data masyarakat dan besarnya anggaran yang telah dihabiskan untuk mengembangkan platform tersebut.

Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah mengatakan, Kemdikbudristek harus berkomitmen menjamin keberlangsungan platform digital setelah periode 2024 berakhir.

"Mengingat banyaknya data yang sudah terunggah dan besarnya anggaran yang diinvestasikan untuk membuat platform tersebut," kata dia dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR bersama Mendikbudristek Nadiem Makarim di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Ferdiansyah mengingatkan, platform digital yang ada harus berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Soalnya, data-data yang dihimpun dalam platform

tersebut sangat besar dan sensitif.

Karena itu, Nadiem harus memastikan jaringan aman dan terproteksi untuk menghindari terjadinya peretasan terhadap sistem Teknologi Informasi di dalamnya.

"Kemdikbudristek harus mencari alternatif solusi apabila terjadi *shutdown* ataupun sistem *down* pada platform-platform digital," ujarnya.

Politisi Fraksi Golkar ini juga meminta Kemdikbudristek senantiasa melakukan *back up* data secara berkala serta menyimpannya dengan sistematis dan aman.

Data-data digital ini harus dijadikan sebagai bahan acuan evaluasi program Kemdikbudristek untuk perbaikan sistem pendidikan. Data ini perlu dibuatkan peta jalan digitalisasi pendidikan di dalam negeri.

Apabila platform digital ini dilanjutkan penggunaannya oleh Kemdikbudristek, maka kementerian harus melakukan alih pengelolaan.

"Yang tadinya menggunakan pihak ketiga menjadi secara mandiri untuk menghindari adanya kebocoran informasi, serta inefisiensi anggaran dan tenaga kerja," tegasnya. ■ KAL